

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Yerusalem (*Yerushalayim*; bahasa Ibrani, *Al-Qud*; bahasa Arab, Menurut versi lain, Yerusalem adaptasi bahasa Ibrani dari bahasa Arab yaitu Darusalam) adalah salah satu kota bersejarah warisan dunia yang masuk dalam lindungan UNESCO mulai tahun 1981. Kota Yerusalem dianggap suci oleh orang Yahudi, Nasrani dan Islam. Di kota ini terdapat tiga bangunan suci dan diagungkan oleh ketiga agama tersebut. Kuil nabi Sulaiman (*Solomon's Temple*) yang menjadi tempat ibadah umat Yahudi. Maharaja Byzantium yaitu Constantine menjadikan Yerusalem sebagai pusat keagamaan Kristen dengan membangun Church of the Holy Sepulcher pada tahun 335M, disamping itu Yesus Kristus juga dilahirkan di salah satu bagian kota ini tepatnya di Bethlehem. Walaupun Al Quran tidak menyebut mengenai nama "Yerusalem" atau "Baitulmuqaddis", tetapi ada hadis yang menyebut mengenainya. Menurut hadis sahih, adalah di Yerusalem Nabi Muhammad s.a.w. naik ke surga semasa peristiwa Isra' Mi'raj. Di sana pula terdapat Qubbat As-Sakhrah, sebuah kubah yang berlapis emas dan berbentuk octagon, yang berada dikompleks Masjidil Aqsa Al Haram Al Sharif<sup>1</sup>.

Sebuah ironi yang tengah terjadi saat ini adalah ketika dua agama, yaitu Israel (Zionis Yahudi) dan Palestina (Islam) terlibat konflik yang berkepanjangan pun berlarut-larut dikarenakan oleh keberadaan sebuah bangunan yang menurut klaim masing-masing agama adalah bangunan yang mewakili identitas keagamaan mereka. Dari sisi umat Islam, keberadaan Masjidil Aqsha Al Haram Al Sharif adalah sebagai tempat dimulainya

perjalanan spiritual vertikal (*mi'raj*) nabi Muhammad SAW<sup>2</sup>. menuju ke Shidratul Munthaha di langit ketujuh, disamping keutamaan-keutamaan (*Fadail*) lain yang dimiliki oleh masjid ini. Adapun menurut agama Yahudi meyakini bahwa terdapat lokasi kuil yang dibangun oleh Nabi Sulaiman (*Solomon's Temple*) yang telah dimusnahkan oleh Nebuchadnezzar, raja Babylon yang kemudian menguasai Yerusalem pada tahun 586 SM lalu pada tahun 530-331 SM Yerusalem dibawah kekuasaan Raja Cyrus II, raja Persia dan dibangunlah kembali waktu itu Kuil Kedua oleh Herod the Great tetapi kemudian dimusnahkan oleh tentara Romawi di tahun 200 SM. Kemudian pada tahun 638 M, tentara Islam menaklukkan kota Yerusalem dan Khalifah Umar bin Khattab sendiri datang untuk menerima penyerahan kota ini dan beliau membangun masjid (yang kemudian dikenal dengan nama Masjidil Aqsha) ditempat Nabi Muhammad SAW. berdiri sebelum mengadakan perjalanan ke langit ketujuh yang dikenal dengan peristiwa Isra' Mi'raj.<sup>3</sup>

Yang menjadi permasalahan kemudian adalah ketika sebagian penganut ekstrimis Zionis Yahudi meyakini bahwa tepat dilokasi bangunan Masjidil Aqsha sekarang adalah dulunya bekas lokasi Kuil Sulaeman (*Solomon's Temple*) yang kemudian akan menjadi lokasi pembangunan kembali Al Haikal (*The third Temple*). Keyakinan yang salah ini diperparah oleh kebijakan Israel ketika mengadakan penggalian disekitar kompleks Masjidil Aqsha. Secara fair, sebenarnya telah banyak hasil penelitian yang membantah keyakinan zionis yahudi diatas, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan hampir 30 tahun oleh lembaga independent Inggris yang menyimpulkan bahwa Dinding Ratapan (*Al Burag*), yang diklaim Israel sebagai bagian dari dinding Al haikal (*The Third Temple*)

<sup>2</sup> Al Quran surah al-Isra ayat 1

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Yerusalem>. Down load Tgl 1 Maret 2007

adalah milik umat Islam. Hasil penelitian ini didukung oleh lembaga internasional PBB. Kemudian dilanjutkan oleh seorang arkeolog Yahudi Meier Drove, dalam penelitiannya selama seperempat abad menyebutkan, tidak ada yang namanya Haikal di bawah al-Aqsha, juga tidak ditemukan Haikal Raja Roma Harodo. Semua hasil penelitian dan pengkajian tentang al-Aqsha ini menyimpulkan bahwa klaim Israel selama ini tidak lain bertujuan politis dan ideologis<sup>4</sup>. Hal ini seiring dengan misi Zionisme, sebuah gerakan kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali lagi ke Zion, bukit di mana kota Yerusalem berdiri<sup>5</sup>, lebih jauh lagi, ideologi zionisme ini mengandung unsur rasialisme atau fanatik kepada bangsa Yahudi yang memandang agama lain, golongan dan bangsa lain adalah dibawah kelas manusia, oleh karena itu mereka harus digunakan, dengan kata lain dimanfaatkan guna mewujudkan kepentingan dan cita-cita Zionisme dalam rangka menciptakan negara Israel<sup>6</sup> Raya (*The Greater Israel*)<sup>7</sup>.

Ketika membicarakan reaksi Indonesia dalam kasus ini terdapat hal yang menarik bagi penulis, bahwa ketika Ibu Pertiwi ini sebagai negara (*state*) yang *a politically organized community which is more or less independent of other states*<sup>8</sup> dan menjadi alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat<sup>9</sup>, ternyata memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia dalam menyikapi peristiwa di atas. Dalam hal ini, politik luar negeri Indonesia memang aneh, dalam pengertian sama sekali tidak menjadikan opini publik di dalam negeri

---

<sup>4</sup> <http://www.infopalestina.com> down load Tgl 21 februari 2007

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Zionis>. down load Tgl 1 Maret 2007

<sup>6</sup> *Israel adalah nama salah satu Nabi yang mulia, Ya'qub (Israil) alaihi salam*

<sup>7</sup> Fathi Yakan, *Islam di Tengah Persekongkolan Musuh Abad ke 20*, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, hal. 78.

<sup>8</sup> Wilbur W. Hhite, *Political Dictionary*, The World Publishing Company, Ohio, 1948, hal. 274

<sup>9</sup> Didi Krieger, *Kamus Politik Internasional*, PT Gramedia, Jakarta, 1992, Hal. 106

sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakannya. Aspirasi, agregasi dan tuntutan sebagian besar masyarakat Indonesia, lenyap begitu saja ketika masuk wilayah "sakral" politik luar negeri. Seolah-olah dua ratus juta suara ummat Islam tidak ada harganya sama sekali<sup>10</sup>.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia mempunyai dan melaksanakan politik luar negerinya sendiri<sup>11</sup>. Politik luar negeri Indonesia tersebut merupakan bagian dari seluruh kebijakan pemerintah, bertujuan untuk mencapai dan memelihara kepentingan nasional di bidang luar negeri, diwujudkan dalam berbagai kegiatan dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk bilateral, multilateral maupun dalam bentuk kerjasama regional dan internasional. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, landasan politik luar negeri Indonesia terletak pada pembukaan UUD 1945, khususnya alinea pertama dan keempat. Adapun alinea pertama berbunyi "... kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."<sup>12</sup> Selain itu, alinea keempat dari UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia bukan saja harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepentingan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial....."<sup>13</sup>. Dari kedua kutipan

---

<sup>10</sup> Harwanto Dahlan, *Intifada dan Sikap Politik Luar Negeri Indonesia*, dalam buku *INTIFADA GELEGAK PERLAWANAN KAUM MUDA PALESTINA*, Avyrouz, Jakarta, 2000. Hal. VIII

tersebut tampak adanya butir-butir penting prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu komitmen pada: pertama, anti kolonialisme; persamaan atau kesederajatan antar bangsa-bangsa di dunia; ketiga, kepentingan nasional; dan keempat, penyelesaian multilateral dan institusional terhadap masalah-masalah global.

Dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Israel, yang dianggap sebagai penjajah negara Palestina, sejalan dengan landasan konstitusional di atas maka pemerintah Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel<sup>14</sup> dan konsekwensinya pemerintah Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik sampai kapanpun kecuali penjajahan Israel atas Palestina dihapuskan. Terkait pula dengan Kebijakan Israel di Yerusalem yang terjadi baru-baru ini (6 Februari 2007) mengenai penggalian Masjid Al Aqsha oleh Israel yang mengabaikan seruan masyarakat internasional agar Israel menghentikan penggalian di wilayah mesjid Al Aqsa karena hal ini hanya akan meningkatkan eskalasi ketegangan baru di Timur Tengah dan dinilai dapat menimbulkan ancaman perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam konteks dalam negeri sendiri, aksi penggalian di sekitar Masjid Al-Aqsa oleh Israel, terus menuai kecaman. Umat Islam di Indonesia diminta bersatu melawan tindakan itu. Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno menegaskan bahwa Indonesia harus memelopori galang kekuatan melawan Israel, karena, menurutnya, hal ini sudah *kenemenen* (keterlalu). Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa meminta seluruh kekuatan Islam bersatu untuk bersama-sama menghukum kebiadaban Israel, bahwa tindakan itu harus dikutuk sekeras-kerasnya. Umat Islam harus menggalang solidaritas internasional, untuk melakukan perlakuan menghukum Israel. Sementara itu Majelis Ulama

Indonesia (MUI) mendukung upaya pemerintah Indonesia mengangkat soal penggalian daerah Masjid Al-Aqsa ke dalam forum internasional. Indonesia bisa mengadukannya ke Dewan Keamanan PBB atau dibahas pada forum negara-negara anggota OKI dan Gerakan Nonblok. Hasrul Azwar yang juga Ketua Komisi VIII DPR (bidang haji) minta badan dunia seperti PBB, OKI, dan negara di Timur Tengah melakukan perlawanan. Ahmad Farihal menyatakan, Israel boleh berbeda dengan Hamas, Fatah, atau PLO soal batas kedaulatan, tapi Israel tidak boleh menyerang Islam. Kalau merusak sama saja dengan menyakiti umat Islam sedunia<sup>15</sup>. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa retorika mengutuk perbuatan Israel saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi untuk mencegah penggalian dan pembuatan jembatan di sekitar Masjid al-Asha, karena yang terpenting melakukan langkah-langkah yang nyata<sup>16</sup>. Presiden PKS Tifatul Sembiring, dalam sebuah orasinya didepan para demonstran yang dihadiri massa mencapai 10 ribuan orang, mengingatkan pemerintah supaya tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, mengingatkan BIN supaya tidak buka kerjasama dengan Israel dan juga tidak lupa mengingatkan Kadin agar tidak membuka kerjasama dagang dengan Israel. Tidak ada kompromi dengan Israel, boikot produk-produk Israel<sup>17</sup>. Bahkan pernyataan yang lebih keras lagi dilontarkan oleh Amir Majelis Mujahidin Ustad Abu Bakar Baasyir menegaskan, perbuatan yang dilakukan Israel sangat biadab karena melakukan penggalian di sekitar tempat suci umat Islam. Menurutnya, upaya menyelamatkan Masjidil Aqsha dari kerusakan yang harus secepatnya dilakukan, dan tidak perlu menggunakan cara-cara negosiasi, tapi dengan memerangnya. Baasyir mengajak seluruh umat Islam untuk berikhtidar untuk memerangi Israel karena seandainya tidak ada

cara lain untuk menghentikan berbagai tindakan kekerasan yang telah melukai umat Islam itu. Menurut Baasyir tidak perlu jalan damai, Israel itu harus dipukul dulu kepalanya baru kalau sudah takut berhenti, selama belum takut ya begitu terus kerjanya<sup>18</sup>. Terakhir, dalam konteks domestik, publik Indonesia memberikan dukungan yang luas bagi terciptanya perdamaian di tanah Palestina, dengan penekanan kepada berdirinya negara Palestina yang berdaulat penuh. Demonstrasi masif yang mendukung Palestina belum lama ini bahkan berhasil mengumpulkan dana hampir 100 ribu dolar AS, suatu nilai yang mencengangkan untuk ukuran Indonesia<sup>19</sup>. Berikut gambar-gambarnya<sup>20</sup>:



Gambar I

### Demonstrasi Dukung Palestina

<sup>18</sup> <http://www.erasuslim.com> down load Tgl 29 Juni 2007

<sup>19</sup> <http://www.republika.co.id> down load Tgl 29 Juni 2007

<sup>20</sup> <http://www.republika.co.id> down load Tgl 29 Juni 2007



Gambar II

### Demonstrasi Dukung Palestina

Gambar di download dari situs: <http://www.eramuslim.com/berita/nas/445de4b6.htm>

Sebuah ironi yang terjadi, ketika pemerintah Indonesia menyatakan tidak mengakui kedaulatan Israel dengan tidak adanya hubungan diplomatik di antara kedua negara sebagai bentuk penolakan terhadap penjajahan dan rasa solidaritas kepada bangsa Palestina juga kecaman demi kecaman terhadap tindakan brutal Israel yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok masyarakat Islam<sup>21</sup> yang menjadi penduduk mayoritas di negara ini, tetapi di sisi lain, pemerintah Indonesia sebagai representasi masyarakat Indonesia di lingkungan internasional cenderung bereaksi lunak terhadap setiap kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina, sebagai contoh, pernyataan pemerintah Indonesia terhadap penggalian di kompleks Masjid Al Aqsha melalui Menlu Hasan Wirayuda, yang

hanya menyesalkan tindakan Israel terhadap penggalian Masjid Al-Aqsha<sup>22</sup>. Lebih ironis lagi ketika Jubir Deplu, Kristiarto Legowo, menyampaikan bahwa dengan membawa protes Pemerintah RI sampai ke Sekjen PBB sudah menunjukkan bentuk konkrit dukungan RI untuk Palestina. Lalu bila Israel tetap meneruskan penggalian yang memunculkan protes banyak pihak serta bentrok di Palestina itu, maka Indonesia akan mempertimbangkan bentuk langkah protes yang lebih keras<sup>23</sup>.

Secara tertulis, memang Indonesia tidak memiliki dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Faktanya, kita sangat dekat dengan negara Israel Zionis tersebut. Apalagi, di PBB, dalam setiap sidang, diplomat-diplomat Indonesia selalu dalam satu kelompok dengan diplomat-diplomat dari Israel, disamping faktor kebetulan sebagai negara-negara yang berawalan huruf "I"<sup>24</sup>.

### **C. Pokok Permasalahan**

Setelah menggambarkan latar belakang permasalahan di atas, maka adapun pokok permasalahan yang kami rumuskan adalah "Mengapa Pemerintah Indonesia tidak Bereaksi Keras Terhadap Penggalian Kompleks Masjid al-Aqsha oleh Israel di Yerusalem Pada Tahun 2007?"

### **D. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa penjelasan yang hendak dicapai oleh penulis, antara lain:

---

<sup>22</sup> [http://202.155.15.208/online\\_detail.asp](http://202.155.15.208/online_detail.asp) down load Tgl 9 februari 2007

<sup>23</sup> <http://www.kaltimpost.web.id> down load Tgl 29 Juni 2007

<sup>24</sup> ...

1. mencari jawaban dan penjelasan mengenai rumusan masalah yang disusun sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama di bangku kuliah.
2. untuk memberikan gambaran betapa kuatnya pengaruh loby zionis Israel di negara ibu pertiwi ini.
3. secara khusus, penulisan ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan strata-1 (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori pada dasarnya bertujuan untuk membantu penulis untuk menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep untuk menyusun hipotesa. Adapun kerangka pemikiran/teori yang digunakan dalam menganalisa pokok permasalahan diatas adalah dengan menggunakan teori sebagai berikut:

### **1. Proses Pembuatan Keputusan.**

Setiap mengambil keputusan selalu mempertimbangkan untung rugi dalam mengambil kebijakan. Disamping itu, para pembuat keputusan sebagai aktor yang rasional juga mempertimbangkan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Bahwa pengambil keputusan, disadari atau tidak, memiliki pendapat tentang prioritas nilai dan konsepsi tentang sarana yang dipunyai dan tujuan tersebut<sup>25</sup>.

Menurut James E. Dougherty pengambil keputusan dapat disasumsikan sebagai

berikut :

*“The decision-maker make his decision within a total perceived environment which includes the salient feautres of his national political system and of the international system as whole thus decision-making theory is linked to system theory, and micro is joined to macro through the perception of the decision-maker, who presumably is aware of his existence at various concentric systematical level”<sup>26</sup>*

Sedangkan dalam pembuatan kebijakan luar negeri, William D. Cooplin

berasumsi:

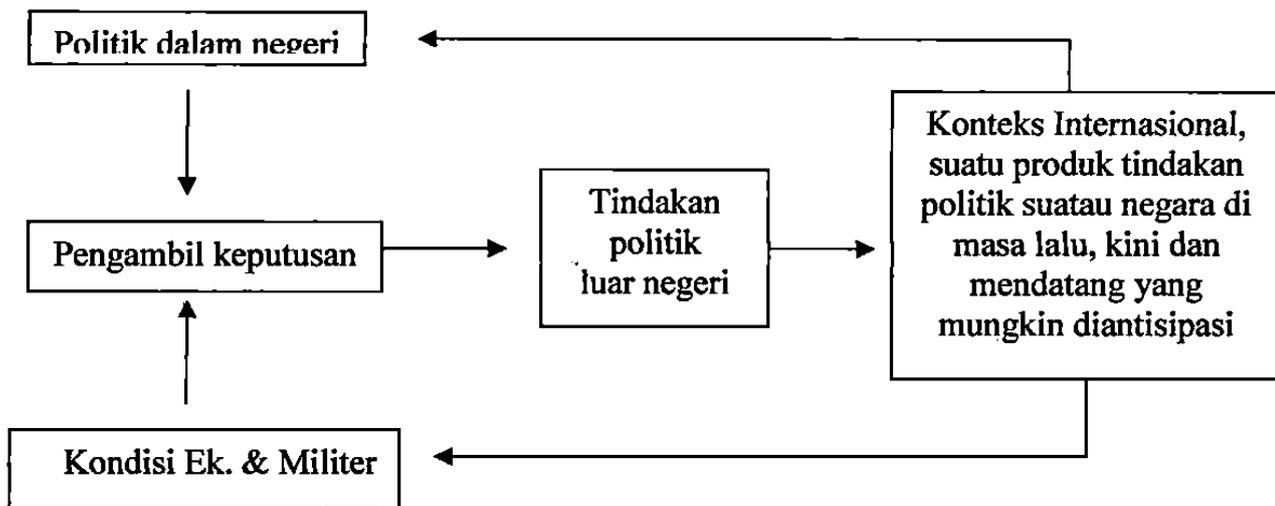
*“Dalam menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pembuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tertentumungkin bisa dipandang sebagai akibat dari ketiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kedua, kemampuan ekonomi dan militer negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi)”<sup>27</sup>.*

Interaksi dari ketiga faktor yang dapat menghasilkan kebijakan luar negeri menurut William D. Cooplin diatas dapat diilustrasikan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraff Jr, *Politik Internasional*, diterjemahkan oleh M. Amien Rais, Fisipol UGM

<sup>27</sup> Djumadi M. Anwar, *Diktat III Politik Luar Negeri Indonesia*, Jur. Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999, hal 22



sumber: William D. Cooplin, Pengantar Internasional Suatu Telaah Teoritis. Bandung. Sinar Baru, Edisi kedua, Cetakan Kedua, 2003, hal. 30.

kebijakan politik luar negeri menurut William D. Cooplin, bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi pengaruh munculnya kebijakan politik luar negeri sebuah negara<sup>28</sup>, yaitu:

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Dalam menganalisa struktur sistem pengaruh kebijakan (policy-influence system), serta peran sistem itu dalam proses perumusan politik luar negeri kami akan mengetengahkan empat kategori *policy influencer* (1) Birokrat, (2) Partai, (3) kelompok Kepentingan<sup>29</sup>.

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Meskipun mempunyai kemampuan destruktif, perkembangan industri merupakan katalisator bagi kekuatan militer dan kemakmuran ekonomi. Kebanyakan negara yang standar hidupnya paling tinggi adalah negara-negara yang tingkat industrinya tinggi. Bersamaan dengan itu, angkatan bersenjata modern sangat mahal dan sangat

<sup>28</sup> William D. Cooplin, Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis, alih bahasa Drs. Marsedes Mardiana, Bandung: Sinar Baru, Edisi kedua, Cetakan Kedua, 2003, hal. 30

bergantung pada peralatan canggih yang diproduksi melalui teknik-teknik industri, sehingga negara-negara yang tingkat industrinya pada umumnya, merupakan negara-negara yang militernya paling kuat. Untuk menelaah kemampuan ekonomi sebagai alat politik luar negeri, ada dua hal yang akan kita bicarakan dalam hal ini (1) kapasitas produksi barang dan jasa dan (2) kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional<sup>30</sup>.

Untuk menaksir kemampuan militer secara keseluruhan, kita akan mengamati tiga aspek kekuatan dan kelemahan militer di dunia dewasa ini (1) kapasitas penggunaan kekuatan militer, (2) tingkat kebergantungan negara-negara pada sumber-sumber luar negeri untuk perlengkapan militer.<sup>31</sup>

### c. Konteks Internasional

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu (1) geografis, (2) ekonomis dan (3) politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara lain<sup>32</sup>

## 2. Konsep Tingkatan Tindakan Kebijakan Luar Negeri

Orientasi, peran dan tujuan terdiri dari pandangan, sikap terhadap dunia luar, keputusan dan aspirasi pembuat kebijakan. Akan tetapi, kebijakan juga mengandung komponen tindakan, yakni hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan pada dasarnya merupakan satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan.

Tindakan dapat juga dianggap sebagai inisiatif yang dikirimkan oleh seorang aktor untuk

mempengaruhi pandangan sipenerima mengenai sipengirim. Proses politik internasional mulai bila negara berusaha melalui berbagai tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku negara lain. Dengan demikian, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan umum suatu negara untuk mengendalikan perilaku negara lain. Para ilmuwan sosial telah mencatat beberapa teknik fundamental yang digunakan individu dan kelompok untuk saling mempengaruhi. Dalam satu sistem politik yang tidak mempunyai pusat kewenangan yang sah yang dapat mengomando para anggota kelompok atau masyarakat, tawar-menawar harus digunakan di antara kesatuan yang berdaulat untuk mencapai atau mempertahankan tujuan mereka. Dalam politik internasional, tindakan dan isyarat mengambil banyak bentuk yang berlainan<sup>33</sup>.

- a. **Persuasi.** Dengan persuasi kita maksudkan semata-mata memprakarsai atau membahas suatu usul dengan pihak lain dan mendapatkan tanggapan yang menguntungkan tanpa dengan tegas mengajukan kemungkinan imbalan atau hukuman. Persuasi mungkin juga mencakup protes dan penolakan yang tidak melibatkan ancaman nyata.
- b. **Tawaran Imbalan.** Dalam situasi ini negara A berjanji melakukan sesuatu yang menguntungkan negara B jika negara B mematuhi keinginan A. Imbalan dapat berupa apa saja yang relevan dalam hubungan internasional.
- c. **Pemberian Imbalan.** Dalam beberapa hal, kredibilitas suatu pemerintah tidak terlalu tinggi dan negara B, sebelum mematuhi keinginan negara A, mungkin mendesak supaya negara A benar-benar memberikan imbalan di muka. Salah satu klise diplomasi perang dingin mengatakan bahwa perbuatan, bukan kata-kata dibutuhkan untuk memberikan imbalan dan konsesi.
- d. **Ancaman Hukuman.** Ancaman hukuman dapat dibagi lebih lanjut dalam dua tipe:

---

<sup>33</sup> E. J. Hulsz, *International Relations: A Textbook*, M. Tahir Achmad, S.H., Direktorat Pendidikan, Jakarta, 1988

## 1. kondisi politik dalam negeri

### a. birokrat

Salah satu tipe *policy influencer* yang ada di setiap negara modern adalah *bureaucratic influencer* (birokrat yang mempengaruhi). Mengingat kompleksnya fungsi pemerintah maka berkembanglah organisasi-organisasi yang berskala luas sebagai bagian dari lembaga eksekutif. Organisasi-organisasi ini biasanya tersusun sesuai dengan garis-garis fungsional dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, politik luar negeri, atau kebijakan-kebijakan kesejahteraan meskipun sering terjadi saling lingkup pada berbagai struktur birokrasi. Kami menggunakan istilah *bureaucratic influencers* (birokrasi yang mempengaruhi) untuk menunjuk kepada berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. Struktur organisasi formal pemerintahan sering sering tidak menunjukkan seluruh *bureaucratic influencers*, karena unit-unit operasi yang sebenarnya mungkin hanya merupakan segmen dari departemen pemerintahan formal atau mungkin pula melintasi sejumlah departemen resmi.

Karena anggota birokrasi juga kadang-kadang merupakan anggota kelompok pengambil keputusan, sukar menggambarkan garis pemisah yang jelas antara anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* dari pengambil keputusan. Inilah yang merupakan salah satu faktor yang membuat kelompok-kelompok birokratis sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Mereka mempunyai akses langsung kepada pengambil keputusan, karena ia bergantung pada mereka dalam hal informasi-informasi yang penting bagi pembuatan kebijakan serta dalam bantuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Karena besarnya jasa kelompok-kelompok birokratis bagi para pengambil keputusan, maka dampak kelompok itu terhadap kebijakan akhir cukup substansial. Kelompok-kelompok birokratis sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena kelompok-kelompok itu menyalurkan informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan itu. Peranan *bureaucratic influencer* dalam proses penyusunan politik luar negeri, dalam sistem

sistem politik ini kelompok-kelompok biokratis sering beroperasi dibelakang layar melalui pemberian informasi untuk mengambil keputusan serta digunakan sebagai instrumen bagi pelaksanaan keputusan itu. Pengaruh dalam proses pengambilan keputusan ditentukan oleh tingkat kepercayaan kelompok-kelompok birokratis itu kepada pemimpin puncak. Oleh karena itu, dukungan rakyat yang penting artinya dalam sistem politik terbuka kurang berperan dalam upaya kelompok birokratis tersebut untuk mempengaruhi kebijakan<sup>37</sup>. Dalam kasus hubungan “mesra” Indonesia-Israel, birokrat yang terlibat adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), indikasi hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau ketika diwawancara oleh Al-Ahram, Koran terkemuka mesir, yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa dirinya merasa jauh dekat dengan Israel dibanding dengan negara-negara arab dan negeri Islam<sup>38</sup>.

#### b. Partai politik

Tipe *policy influencer* kedua adalah partai-partai politik. *Influencer* ini bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. *Influencer* ini berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan personel-personel yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. *Partisan Influencer* bisa dipandang sebagai informasi dua arah dan mempengaruhi saluran di antara para pengambil keputusan resmi dan anggota masyarakat. Selain lebih banyak memfokuskan perhatian pada masalah pembentukan kebijakan dalam negeri, *influencer* ini juga berusaha mempengaruhi politik luar negeri, terutama apabila kebijakan-kebijakan itu membawa *ramifikasi* (percabangan) dalam negeri yang kritis.

Kemampuan *partisan influencers* untuk membentuk politik luar negeri dalam sistem terbuka agak terbatas. *Partisan influencers* hampir semua negara demokrasi yang stabil memainkan peran yang terbatas dalam menyetujui atau menolak tindakan-tindakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh para pengambil keputusan politik

luar negeri, meskipun mereka mungkin dalam jangka panjang berperan dalam mengubah sikap-sikap dasar masyarakat melalui perdebatan umum. Banyak alasan untuk peran terbatas yang dimainkan oleh *partisan influencers* dalam politik luar negeri di negara-negara demokrasi yang stabil. Alasan utama adalah adanya kecenderungan *partisan influencers* untuk lebih memperhatikan politik dalam negeri ketimbang politik luar negeri. Selain itu, lembaga eksekutif sering menggunakan kriteria keamanan nasional untuk membahas perdebatan serta oposisi dalam politik luar negeri. *Partisan influencers* in sering berada dalam posisi yang sulit, untuk memutuskan apakah harus memanfaatkan bahan-bahan rahasia, yang berarti mereka harus menghentikan kecaman agar tidak menimbulkan "kebocoran keamanan", atau tetap mengabaikan dokumen-dokumen yang ada, yang berarti mereka bisa mengecam tanpa harus dituduh sebagai melanggar kerahasiaan. Selain itu, kompleksitas isu politik luar negeri, kerap kali menuntut keahlian tertentu yang tak bisa didapat oleh para legislator yang sibuk. Oleh sebab itu, partisan influencers tidak hanya menghentikan inisiatif pembuatan politik luar negeri, tetapi juga jarang berusaha untuk memveto atau tidak mengesahkan kebijakan-kebijakan yang berasal dari pengambil keputusan politik luar negeri<sup>39</sup>. Terkait dengan kasus yang diangkat, kebanyakan partai-partai politik yang berkuasa (partai politik pendukung pemerintah), dari presiden Megawati Soekarno Putri hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia saat ini, memiliki hubungan yang "manis" dengan loby Zionis, hal ini dapat dilihat dari indikator dengan tiadanya dorongan dari partai-partai tersebut untuk mencabut Surat Keputusan Menperindag No.23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001 yang melegalkan hubungan dagang antara RI dengan Zionis-Israel<sup>40</sup>.

c. kepentingan yang mempengaruhi

Tipe *Policy Influencer* ketiga, yaitu *interest influencer* (kepentingan yang mempengaruhi, terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan

<sup>39</sup> William D. Cooplin, *op, cit*, hal. 84

<sup>40</sup> <http://adabekabang.wordpress.com/down-load/Tel-28-februari-2007>

sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari *policy influencer* atau pengambil keputusan yang lain. Kebanyakan kepentingan ini bersifat ekonomis karena orang-orang sering dimotivasi untuk melakukan tindakan kolektif melalui persamaan kepentingan ekonomi. Kepentingan-kepentingan yang bersifat nonekonomis juga bisa digunakan sebagai dasar dari tindakan kolektif, terutama apabila ada ikatan-ikatan etnis atau geografis di antara mereka. Dalam sistem politik terbuka, *interest influencer* memainkan peran yang lebih besar. Biasanya banyak organisasi dan kelompok informal yang mewakili berbagai kepentingan yang bersifat ekonomis dan non ekonomis. Karena kelompok-kelompok itu kadang memiliki sumber finansial yang besar, mereka mampu mempengaruhi para pemilih serta *partisan influencers*. Meskipun *interest influencers* berperan dalam proses perumusan politik luar negeri dalam sistem politik terbuka, kita tidak boleh berasumsi bahwa *influencers* ini mendikte politik luar negeri negara. Sebaliknya seperti yang diutarakan oleh Bauer, Pool dan Dexter dalam studi mereka tentang bisnis dan kebijakan publik, kepentingan-kepentingan bisnis serta pelobi Amerika sering "terbatas dalam menggunakan tekanan atau sangat mengabaikan masalah kepada siapa tekanan harus diarahkan agar menguntungkan". Keterkaitan kasus yang diangkat diatas dengan kelompok kepentingan yang mempengaruhi adalah *Rotary Club* (RC). Syaikh At-Tamimi (mantan Imam Masjidil Aqsha) maupun Prof. A. Salaby (Mesir) berpendapat bahwa RC adalah perabot gerkan zionisme internasional. RC bertugas mengumpulkan kalangan bisnis. Organisasi ini dapat berfungsi sebagai 'kontak bisnis' (*clearing house*), dan dapat pula merupakan sarana pengumpulan dana bagi keperluan zionisme<sup>41</sup>. Rotary Club pertama didirikan pada 1905 di Chicago oleh seorang zionist Paul Harris. *National Association of Rotary Clubs* (Asosiasi Rotary Club Nasional) dibentuk pada 1910. Namanya kemudian diganti menjadi *Rotary International* pada 1922 karena telah terbentuknya cabang-cabang di luar negeri. *Rotary Club* pertama di Indonesia didirikan pada 1927 di Yogyakarta. Hingga 1941 telah ada 26 klub dengan 219 anggota. Kegiatan *Rotary* dihentikan pada masa Perang

---

<sup>41</sup> U. Didi Kriyant, & Didi Kriyant, *Elite & Data: Kehidupan di Indonesia: Dulu dan Kini*, Klatka.

Dunia II dan dilanjutkan mulai 1946<sup>42</sup>. Namun, *interest influencers* masih merupakan faktor penting dalam proses penyusunan politik luar negeri, karena mereka mempengaruhi kompleksitas proses politik dalam negeri. *Influencers* ini mungkin saja tidak menentukan politik luar negeri, tetapi mereka pasti berperan dalam perhitungan para pengambil keputusan politik luar negeri<sup>43</sup>.

#### 1. kemampuan ekonomi dan militer

##### a. dimensi kemampuan ekonomi

###### i. kapasitas produksi barang dan jasa

Penaksiran kapasitas ekonomi suatu negara harus mencakup analisis tentang kemakmuran negara tersebut, sejauh mana kekayaan itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan pola-pola pertumbuhan ekonominya. Jadi, kita berfokus pada masalah jumlah absolut barang dan jasa yang diproduksi; jumlah relatif (yaitu relatif terhadap permintaan terhadap ekonomi); dan prospek pertumbuhan ekonomi.

Para ekonom telah mengembangkan konsep *gross national product* (GNP) untuk mengukur nilai sebuah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Karena angka-angka GNP bisa dikonversikan ke dalam satu standar mata uang, kita bisa menggunakannya untuk membandingkan kekayaan suatu negara dengan kekayaan negara lain, meskipun perbedaan dalam nilai tukar mata uang mengandung suatu masalah<sup>44</sup>.

###### ii. kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional

Dengan cara-cara tertentu semua negara dewasa ini dipengaruhi oleh perdagangan dan finansial internasional. Hubungan antara negara dan unsur-unsur ekonomi internasional sering dipandang dari segi neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Semua transaksi luar negeri, termasuk pembelian dan penjualan dari dan ke luar negeri, investasi luar negeri, pengeluaran militer di

<sup>42</sup> <http://id.wikipedia.org> down load Tgl 9 Maret 2007

<sup>43</sup> William D. Cooplin, *op, cit*, hal. 87-88

<sup>44</sup> William D. Cooplin, *op, cit*, hal. 115

negara lain dan pengeluaran serta penerimaan lainnya membentuk neraca pembayaran. "Neraca" mengacu kepada perbedaan neto antara debet (pembayaran) tertentu dan kredit (penerimaan) tertentu dan menunjukkan apakah suatu negara mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban internasionalnya serta terpaksa mengeluarkan cadangannya; atau apakah kekayaan yang masuk ke negeri itu membuat negara tersebut berada pada posisi yang menguntungkan. Kita harus membedakan dengan jelas neraca pembayaran dari neraca perdagangan. Yang disebut belakangan lebih banyak berperan tetapi jauh dari menentukan<sup>45</sup>.

b. dimensi kemampuan militer

i. kapasitas penggunaan militer

Tugas menaksir kapasitas penggunaan kekuatan militer akan sulit, apabila kita berfokus untuk meramalkan akibat dari suatu konflik militer tertentu. Namun, agak lebih mudah membuat penilaian umum dengan cara menentukan kriteria terpenting dalam kekuatan militer. Sebelumnya kita mencatat tiga kriteria: (1) jumlah pasukan, (2) tingkat pelatihan, dan (3) sifat perlengkapan militer<sup>46</sup>.

Dari segi jumlah personil militer, Indonesia memiliki 290.000 personel, masih berada di atas dari dua negara tetangga (Malaysia dengan 98.000 personel, Singapura dengan 60.000 personel) sedangkan Indonesia berada dibawah dibawah tiga negara ASEAN lainnya dari segi jumlah personel militer (Vietnam dengan 480.000 personel, Myanmar dengan 420.000 personel, Thailand dengan 300.000 personel)<sup>47</sup>.

Terkait dengan pelatihan militer pula, terdapat fakta yang terungkap bahwa pada awal tahun 1980-an, ABRI, kala itu, mengirim prajurit-prajuriti pilihannya untuk pergi ke Israel dalam rangka latihan bersama<sup>48</sup>.

Dari segi perlengkapan militer, Indonesia memiliki 840 tank, dana \$1200 juta dan 120 pesawat udara, masih berada diatas kamboja dengan 260 tank, dana \$600 juta dan 22 pesawat udara<sup>49</sup>.

ii. tingkat kebergantungan pada sumber-sumber luar negeri

<sup>45</sup> William D. Coplin, *op. cit.*, hal. 120-122

<sup>46</sup> William D. Cooplin, *op. cit.*, hal. 124

<sup>47</sup> <http://www.scaruffi.com> down load Tgl 12 Maret 2007

<sup>48</sup> Herry Nurdi, *op. cit.*, hal. 225

<sup>49</sup> <http://www.scaruffi.com> down load Tgl 12 Maret 2007

Selain menaksir kemampuan militer, kita perlu menyadari apakah sumber-sumber kemampuan itu berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri. Makin bergantung suatu negara pada luar negeri dalam menunjang kekuatan angkatan bersenjata, makin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari luar, dalam menggunakan kekuatan. Karena seluruh ekonomi dunia sampai taraf tertentu berkaitan dengan perdagangan dan karena banyak barang yang diperdagangkan itu berhubungan dengan industri perdagangan, semua negara sedikit banyak bergantung pada negara-negara lain dalam kekuatan militernya, terutama apabila cadangan habis. Namun, kita bisa membuat pemisahan yang tegas antara kebergantungan pada negara asing, untuk (a) produk-produk primer dan dukungan logistic dan (b) produk-produk jadi untuk militer<sup>50</sup>.

Dari segi produk-produk primer dan dukungan logistic perlengkapan militer, Indonesia menggantungkan sebagian besar kebutuhannya kepada Amerika Serikat. Kadaan ini dimulai ketika kebijakan politik luar negeri AS ditujukan untuk membendung (*containment policy*) kekuatan komunis di Asia Tenggara pada awal keruntuhan rezim Soekarno. Tetapi hubungan ini sangat bertolak belakang ketika pada tahun 1991 ketika AS menetapkan embargo militer terhadap Indonesia, berdasar kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Timor-Timur. Tak dapat disangkal, pemerintah Indonesia mengalami sejumlah kesulitan akibat penerapan embargo militer. Dalam hal ini, banyak peralatan militer Indonesia yang dibeli dari AS sudah aus dan perlu diganti. Akibatnya, banyak peralatan militer Indonesia tidak bisa digunakan lagi. Hal tersebut mengganggu kegiatan operasional pertahanan dan keamanan yang dilakukan militer Indonesia. Karena itu pula, Indonesia pun telah menjajaki pembelian senjata dan peralatan militer lainnya dari negara lain di luar AS. Namun, ketergantungan militer Indonesia terhadap AS yang cukup tinggi membuat sejumlah upaya alternatif yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak begitu signifikan dalam memodernisasi militer Indonesia<sup>51</sup>. Dari segi produk-produk jadi untuk militer, pemerintah Indonesia, selain keberadaan pesawat F-16, F-5 Tiger,

---

<sup>50</sup> William D. Cooplin, *op. cit.*, hal. 126-127

<sup>51</sup> [http://www.scaruffi.com/download/Tel\\_12\\_Maret\\_2007](http://www.scaruffi.com/download/Tel_12_Maret_2007)

Hawk 100/200, Hercules C-130<sup>52</sup> buatan Amerika Serikat, pemerintah juga telah membeli sejumlah pesawat Sukhoi dari Rusia.

Pembahasan tentang dimensi kemampuan ekonomi dan militer, mengungkapkan tiga tipologi negara yang bisa membantu untuk memaparkan analisis tentang faktor ekonomi dan militer sebagai alat politik luar negeri. Kami membedakan berbagai faktor ekonomi dan militer, yang diasosiasikan dengan negara-negara terbelakang dengan berbagai faktor yang diasosiasikan dengan negara-negara maju. Negara adikuasa, yang sekarang adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet, merupakan jenis negara maju yang khusus. Kondisi-kondisi ekonomi dan militer negara-negara terbelakang biasanya adalah (1) GNP per kapita yang rendah dengan spesialisasi dalam produksi bahan mentah dan produk pertanian; (2) ekonomi yang bergantung pada negara lain dalam hal manufaktur, kapital dan pasar; (3) kesulitan dalam neraca pembayaran karena kurangnya ekspor untuk menutupi kurangnya konsumen dan investasi; dan (4) angkatan bersenjata konvensional yang tidak terlatih dengan baik dan bergantung pada dukungan luar negeri yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Sebaliknya, negara-negara maju dicirikan oleh (1) GNP per kapita yang relatif tinggi; (2) kapasitas produksi industri yang lebih bervariasi dengan suatu spesialisasi dibidang produk manufaktur; (3) angkatan bersenjata konvensional yang terlatih baik, dan memainkan peran ekstensif dalam politik luar negeri, meskipun bisa juga digunakan untuk memelihara stabilitas dalam negeri; dan (4) sangat terlibat dalam perdagangan dunia. Kedua negara adikuasa itu sama-sama memiliki kemampuan ekonomi dan militer yang dimiliki negara-negara maju, namun kedua negara itu juga memiliki arsenal nuklir yang cukup besar, termasuk kemampuan untuk meluncurkan senjata-senjata nuklir keseluruh dunia ditambah keterlibatan ekonomi dan militer yang ekstensif di beberapa kawasan di luar batas-batas wilayah negara mereka. Dalam hal distribusi ketiga tipe itu keseluruh dunia, negara-negara terbelakang merupakan mayoritas, termasuk negara-negara di Afrika kecuali Afrika Selatan, negara-negara di Timur Tengah kecuali Israel, negara-negara di Asia kecuali Jepang, dan negara-negara di

---

<sup>52</sup> <http://www.pdat.co.id> down load Tgl 12 Maret 2007

Amerika Tengah dan Selatan. Untuk negara-negara maju sebagian besar berada di Eropa dan Amerika Utara<sup>53</sup>.

### 3. konteks internasional

#### a. geografis

Geografi masih memainkan peran politik luar negeri yang penting, meskipun bukan peran terpenting seperti yang diberikan oleh para ahli geopolitik masa lalu. Seperti yang didemonstrasikan oleh Russett dalam analisis kuantitatifnya yang gemilang tentang berbagai dimensi perilaku negara, proksimitas atau kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan negara, perilaku pemberian suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar pemerintah<sup>54</sup>.

Secara geografis Indonesia terletak diantara  $6^{\circ}$  LU –  $11^{\circ}$  LS dan  $95^{\circ}$  BT -  $141^{\circ}$  BT, antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, antara Benua Asia dan Benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteranian. Dilihat dari lintangnya, Indonesia terletak diantara  $6^{\circ}$  LU (Lintang Utara) dan  $11^{\circ}$  LS (Lintang Selatan). Letak lintang yang sedemikian itu merupakan petunjuk bahwa: • Sempadan bahagian utara wilayah Indonesia ialah  $6^{\circ}$  LU dan paling selatan ialah  $11^{\circ}$  LS. (Tempat paling utara ialah Pulau We dan tempat yang paling selatan ialah Pulau Roti). • Jarak lintangnya ialah  $17^{\circ}$ . • Sebahagian besar wilayah Indonesia terletak dibelahan bumi selatan. • Wilayah Indonesia dilalui oleh garis ekuator (khatulistiwa). Dilihat dari letak garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak diantara  $95^{\circ}$  BT dan  $141^{\circ}$  BT. Ini bererti: • Batas paling barat wilayah Indonesia ialah  $95^{\circ}$  BT dan paling timur ialah  $141^{\circ}$  BT. • Jarak bujurnya ialah  $46^{\circ}$  (sekitar 5000 km, atau hampir 1/8 keliling bumi). Perbedaan garis bujur sedemikian itu menyebabkan adanya perbedaan waktu. • Semua wilayah Indonesia terletak dibelahan bumi timur (dihitung dari meridian  $0^{\circ}$ ). Letak astronomis yang demikian itu menunjukkan bahwa Indonesia terletak didaerah iklim tropis. Daerah iklim tropis terdapat diantara  $23,5^{\circ}$  LU atau tropic of cancer, dan  $23,5^{\circ}$  LS atau tropic of



Amerika, Jepang, dan Prancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera dan Papua Barat<sup>60</sup>.

Majalah Gontor, awal Januari 2004 lalu menurunkan isu yang sensitif tentang jaring-jaring Zionis di Indonesia. Dalam salah satu tulisan, majalah ini menurunkan sebuah wawancara dengan Muchrim Hakim, Ketua Kamar dagang Indonesia Komite Timur Tengah. Dalam wawancara tersebut, Muchrim sempat menyebut, salah satu bisnis Israel yang masuk ke Indonesia adalah di bidang media. Gontor menyebut SCTV sebagai rekanan bisnis yang terkait dengan negara penjajah Israel. Lewat perantara PT. Mitra Sari Persada, Israel disebut-sebut mengantongi saham sebesar 21% dari keseluruhan saham stasiun terkemuka itu. Ada pula saham spekulasi internasional George Soros yang disebut-sebut masuk melalui Bhakti Investama, salah satu pemegang saham jaringan majalah Tempo<sup>61</sup>.

### c. Politis

Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan-keputusan politik luar negeri suatu negara<sup>62</sup>. Pasang surut politik internasional, terutama pada periode perang dunia II sampai pasca perang dingin, lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu konvensional dan lebih pada tarik-menarik kepentingan ideologis antara AS sebagai kiblat ideologi kapitalis dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis.. Dunia mulai melihat masa depan yang lebih baik saat perang dingin usai, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 dan bubarnya Soviet awal tahun 1992, yang kemudian diikuti terbentuknya Uni Moneter dan Ekonomi di Eropa tahun 1991 melalui perjanjian Maastricht. Rentetan sejarah itu tidak lepas dari peran AS yang turut menorehkan catatan penting dalam sebuah pengaturan sistem dunia. Oleh karena itu, AS segera setelah perang dingin berakhir, terus melancarkan program-programnya, seperti liberalisasi ekonomi dunia, demokratisasi, hak-hak asasi manusia, dan isu non-konvensional lainnya, termasuk terorisme. Dari sini tampak pola politik internasional tengah mengarah kepada unipolar, dengan AS sebagai pusatnya, hasrat menjadi hegemon tunggal, tampak semakin nyata sejak perang dingin berakhir. Ini juga dapat dilihat dari beberapa peristiwa seperti

perang Vietnam, perang Teluk (Iraq-Amerika), dan terakhir perang Afghanistan. Dominasi AS dalam organisasi-organisasi internasional, misalnya PBB begitu kental, dengan memaksa dewan keamanan mengeluarkan resolusinya untuk memerangi terorisme. Gencarnya kampanye perang melawan terorisme global, mendesak setiap negara untuk menyatakan dukungannya, bahkan RRC sekalipun, demi kepentingan pasar, akhirnya memberi restu, demikian pula Rusia, memastikan di belakang Amerika, karena hubungan yang mulai baik antara keduanya. Mencermati perkembangan dan perubahan yang terjadi, bisa dikatakan bahwa konsep balance of power yang ingin dibangun pasca perang dingin mengalami dis-orientasi, sebab kenyataannya, AS menjadi satu-satunya kekuatan tak tertandingi sampai kini.<sup>63</sup> Celakanya, setali tiga uang dengan Singapura, ternyata Zionis juga telah menanamkan cengkramannya di negara Paman Sam ini. Amerika benar-benar sangat terwarnai oleh Lobi Yahudi dan pro-Israel. Dan hal ini tak lepas dari peran AIPAC (*American Israel Political Action Community*). Organisasi lobi paling aktif di dunia yang beranggotakan 60.000 orang Yahudi<sup>64</sup>.

Jadi, perlu disadari bahwa konteks internasional memainkan peran besar dalam menentukan politik luar negeri, meskipun peran itu tidak sekonklusif yang diargumentasikan oleh beberapa ahli geopolitik dan kaum realis. Dalam analisis final, konteks internasional akan memungkinkan kita untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara hanya parsial. Tetapi tidak akan mampu menjelaskan keputusan-keputusan tertentu atau bahkan kebijakan luar negeri umum, apabila hanya mengamati konteks internasional. Alih-alih kita harus menelaah proses-proses politik luar negeri di dalam negara itu, agar bisa memahami interaksinya dengan konteks internasional<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> <http://www.dephan.go.id> down load Tgl 12 Maret 2007

<sup>64</sup> Herry Nurdi, *op. cit*, hal. 70.

<sup>65</sup> William D. Cooplin, *op. cit*, hal 168

## **F. Hipotesa**

Setelah menentukan teori dan menerapkannya dengan mengumpulkan data-data yang relevan dan terkait dengan sikap pemerintah Indonesia yang tidak bereaksi keras terhadap penggalian Masjid Al Aqsha oleh Israel di Yerusalem, maka kami menarik beberapa kesimpulan sementara, sebagai berikut.

### **1. kondisi politik dalam negeri**

Bahwa kondisi politik dalam negeri Indonesia telah diwarnai oleh pengaruh Zionis-Israel, dengan adanya keberadaan pengaruh mereka di birokrasi pemerintahan, partai politik, kelompok kepentingan.

### **2. kemampuan ekonomi dan militer**

Kemampuan ekonomi dan militer Indonesia pun mengalami ketergantungan kepada keberadaan pemodal dan supplier luar, menyebabkan seingnya muncul intervensi terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia.

### **3. konteks internasional**

Pula dalam hal ini, secara Geografis, ekonomis dan politis, Indonesia sangat jelas tidak bisa menghindar dari pengaruh zionis internasional, dampaknya pun bisa tertebak dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri kita yang melunak terhadap Israel dalam kasus penggalian Masjid Al Aqsha.

## **G. Metode Penulisan**

Penulisan ini dilakukan dengan metode eksplanatif, menjelaskan berdasarkan fakta, fenomena dan peristiwa yang diketahui melalui data yang dikumpulkan dari studi pustaka. Data yang dipakai adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur

makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, compact disc dan juga situs-situs internet. Dari data-data yang terkumpul kemudian, yang sesuai dengan masalah, diambil untuk didiskripsikan guna menerangkan permasalahan yang ada.

## **H. Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembahasan dalam tulisan skripsi ini secara umum menggambarkan pengaruh zionis dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia pada tahun 2007 dan sebelumnya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing babakan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab.

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka dasar teori, aplikasi teori, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **Bab II Politik Luar Negeri Republik Indonesia**

Bab ini akan berisi tentang dasar-dasar politik luar negeri Indonesia, dinamika politik luar negeri Indonesia terhadap Israel dan dinamika politik luar negeri Indonesia

### **Bab III Penggalian Masjid Al aqsha**

Bab ini akan berisi tentang aksi Israel dalam penggalian Masjid Al aqsha, reaksi dan desakan masyarakat Indonesia terhadap penggalian Masjid Al Aqsha dan reaksi pemerintah RI terhadap penggalian Masjid Al Aqsha.

### **Bab IV Sebab-Sebab Reaksi Pemerintah Indonesia Yang Tidak Keras Terhadap Penggalian Masjid Al Aqsha oleh Israel di Yerusalem**

Bab ini akan membicarakan pengaruh zionis Yahudi dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks politik dalam negeri, konteks ekonomi dan militer serta konteks internasional.

### **Bab V Kesimpulan**

Materi ini akan membahas tentang materi penelitian ini yang diambil dari